
**ANALISA PERBANDINGAN RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014-2018****Oleh****Hasmayati¹⁾, Veronika Yuni T²⁾, Siti Hasanah³⁾, Suyadi⁴⁾****¹Program Studi Akuntansi, Universitas AZZAHRA****Jl. Jatinegara Barat No. 144 Kampung Melayu Jakarta Timur 13320****²Program Studi Sistem Informasi, Universitas Jayabaya****³Program Studi Komunikasi, Universitas Jayabaya****⁴Program Studi Akuntansi/Ekonomi, Universitas Jayabaya****^{2,3,4}Jl. Pulomas Selatan Jakarta Timur****Email: hasmayati@gmail.com****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jakarta dan Pemerintah Daerah Surabaya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan cara melakukan analisis perbandingan Rasio Keuangan Daerah. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Keserasian dan Pertumbuhan sehingga kesimpulan pada penelitian ini hanya berlaku bagi Pemerintah Daerah Jakarta dan Pemerintah Daerah Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain dan hanya membandingkan dua objek penelitian didalam satu variabel yaitu Pemerintah Daerah Jakarta dan Pemerintah Daerah Surabaya. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jakarta dan Surabaya selama periode 5 tahun tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun akumulasi semua Rasio menunjukkan hasil persentase dan kriteria cukup baik. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah Jakarta dan Surabaya mampu mengelola Keuangan Daerah dengan cukup baik. Pemerintah Daerah Kota Jakarta dan Surabaya diharapkan dapat mempertahankan pencapaian yang ada dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik pada periode selanjutnya.

Kata Kunci: Analisa Perbandingan, Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan**PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah Provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta pemerintah daerah ini sendiri memiliki tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah.

Tugas dan aktivitas yang dijalankan Pemerintah Daerah sudah pasti berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Menurut UU Nomor 23 tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang



terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).

Penelitian ini hanya dilakukan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan dengan mengacu pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diteliti, dan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Jakarta dan Pemerintah Daerah Surabaya, sehingga kesimpulan pada penelitian ini hanya berlaku bagi Pemerintah Daerah Jakarta dan Pemerintah Daerah Surabaya.

LANDASAN TEORI

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah, sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian diantaranya dalam menentukan instrumen data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Desain penelitian juga merupakan langkah agar penelitian bisa dilakukan dan dapat diidentifikasi setiap detail langkah/tahapannya. Sehingga dalam perjalanannya peneliti akan mendapat panduan dan tujuan penelitian tidak melenceng. Semacam panduan yang fleksibel dan tidak seketat dalam menjalankan prosedur, desain penelitian merupakan peta agar peneliti bisa tahu sedang dimana dan arah mana yang harus dituju dari aktivitas penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Fenomena atau

populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industri dan perspektif lain. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain dan hanya membandingkan dua objek penelitian didalam satu variabel yaitu Pemerintah Daerah Jakarta dan Pemerintah Daerah Surabaya. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka Variabel dan Definisi Operasional Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dimana kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah yaitu:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Salah satu contoh Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100^*$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin

baik. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

Rasio Efektivitas Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

Rasio Efisiensi =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemerintah Daerah Jakarta

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain dianggarkan dalam APBN.

Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang terkait dengan kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pemerintah melalui menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara administratif Kota Jakarta memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi provinsi Jawa Barat
- Sebelah Selatan dengan Kota Depok provinsi Jawa Barat
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang provinsi Banten

Gambar Peta DKI Jakarta



2. Pemerintah Daerah Surabaya

Pemerintahan Kota Surabaya (Dialek Arekan: Pemerintah Kuto Suroboyo) merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di kota Surabaya. Menurut Bappenas, Surabaya adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Makassar.

Letak Kota Surabaya yang sangat strategis berada hampir di tengah wilayah Indonesia dan tepat di selatan Asia menjadikannya sebagai salah satu hub penting bagi kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagai salah satu pusat perdagangan, Surabaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan bagi wilayah Jawa Timur, namun juga memfasilitasi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Kalimantan, dan kawasan Indonesia Timur

Surabaya dan kawasan sekitarnya merupakan kawasan yang paling pesat pembangunan ekonominya di Jawa Timur dan salah satu yang paling maju di Indonesia. Selain itu, Surabaya juga merupakan salah satu kota terpenting dalam menopang perekonomian Indonesia. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan

perdagangan. Surabaya adalah pusat perdagangan yang mengalami perkembangan pesat. Industri-industri utamanya antara lain galangan kapal, alat-alat berat, pengolahan makanan dan agrikultur, elektronik, perabotan rumah tangga, serta kerajinan tangan

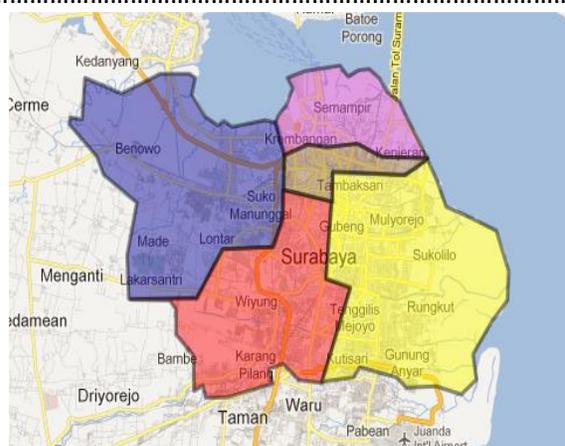
Selain itu, Surabaya juga merupakan kota pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Pelabuhan terpenting di Surabaya adalah Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan pelabuhan perdagangan, peti kemas, dan penumpang terbesar kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Di Surabaya juga terdapat Terminal Pelabuhan Teluk Lamong yang merupakan terminal pelabuhan penyangga utama Pelabuhan Tanjung Perak. Terminal Pelabuhan Teluk Lamong ini menjadi green port pertama di Indonesia serta merupakan salah satu terminal pelabuhan terancang di dunia di mana seluruh sistem operasinya otomatis dan menggunakan komputer.

Pemerintahan kota Surabaya dipimpin oleh seorang wali kota, yang dipilih secara demokratis berdasarkan UUD 1945, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Surabaya terdiri atas pemerintah kota Surabaya dan DPRD kota Surabaya. Dasar hukum bagi kota Surabaya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Surabaya berstatus sebagai kota yang menjadi bagian dari provinsi Jawa Timur. Wilayah Surabaya kemudian dibagi lagi menjadi 31 kecamatan dan 163 kelurahan.

Batas wilayah Kota Surabaya berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu

- a. Sebelah Timur dan Utara dengan Selat Madura
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Sidoarjo
- c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Gresik

Gambar 4. 2 Peta Surabaya



Pembahasan

1. Posisi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jakarta dan Surabaya.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jakarta Tahun 2014-2018

Hasil dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jakarta yang dihitung dari tahun 2014 hingga 2018 memperlihatkan perkembangan sebagaimana tabel perhitungan dibawah ini.

Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jakarta (Dalam Jutaan Rupiah)

| No | Tahun | PAD | Total Pendapatan | Rasio Kemandirian |
|----|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2014 | 31.274.215 | 43.824.300 | 71,36% |
| 2 | 2015 | 33.686.176 | 44.209.238 | 76,20% |
| 3 | 2016 | 36.888.017 | 53.784.706 | 68,58% |
| 4 | 2017 | 43.901.488 | 64.823.887 | 67,72% |
| 5 | 2018 | 43.327.136 | 61.235.824 | 70,75% |
| 6 | Jumlah | 189.077.032 | 267.877.955 | 70,58% |

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan dari Tabel diatas maka untuk Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jakarta dalam 5 tahun adalah:

- 1) Tahun 2014 PAD kota jakarta sebesar Rp.31.274.215 Juta dan Total Pendapatan Rp. 43.824.300 Juta menghasilkan RKKD Kota Jakarta sebesar 71,36 %.
- 2) Tahun 2015 dengan PAD Rp.33.686.176 Juta dan Total Pendapatan Rp.44.209.238 Juta meningkatkan RKKD Kota Jakarta menjadi sebesar 76,20%
- 3) Tahun 2016 PAD sebesar Rp.36.888.017 Juta dan Total Pendapatan Rp.53.784.706 Juta RKKD Kota Jakarta mengalami penurunan 7.62% menjadi 67,72%.
- 4) Tahun 2017 dengan PAD Rp.43.901.488 Juta dan Total Pendapatan Rp. 64.823.887

Juta kembali mengalami penurunan sebesar 0.86% menjadi 67,72%.

- 5) Tahun 2018 PAD Rp.43.327.136 Juta dan Total Pendapatan Rp.61.235.824 Juta menjadikan RKKD Kota Jakarta sebesar 70.75%.
- 6) Dihitung dari Jumlah PAD dan Total Pendapatan selama 5 tahun, dengan jumlah PAD Rp.189.077.032 Juta dan Total Pendapatan Rp.267.877.955 Juta maka jumlah RKKD Kota Jakarta selama 5 tahun (2014-2018) adalah sebesar 70,58%.

Hasil perbandingan Rasio Kesaerasian kedua pemerintah daerah memiliki tingkat dan perkembangan masing-masing dari tahun 2014 hingga 2018 sebagaimana tabel perhitungan dibawah ini.

Perbandingan Rasio Keserasian Kota Jakarta dan Surabaya Tahun 2014-2018

| No | Thn | Jakarta | | Suraaya | | Selisih | |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | ----- | | ----- | | Selisih | |
| | | RBO | RBM | RBO | RBM | RBO | RBM |
| 1 | 2014 | 72,45 % | 27,54 % | 75,39 % | 24,61 % | 2,94 % | 2,94 % |
| 2 | 2015 | 75,98 % | 24,01 % | 72,50 % | 27,50 % | 3,49 % | 3,49 % |
| 3 | 2016 | 80,89 % | 19,11 % | 74,98 % | 25,02 % | 5,91 % | 5,91 % |
| 4 | 2017 | 78,19 % | 21,78 % | 68,18 % | 31,82 % | 10,01 % | 10,05 % |
| 5 | 2018 | 76,88 % | 23,12 % | 70,09 % | 29,72 % | 6,78 % | 6,60 % |
| 6 | Jumlah | 77,08 % | 22,91 % | 71,95 % | 28,01 % | 5,14 % | 5,10 % |

*RBO=Rasio Belanja Operasi

*RBM=Rasio Belanja Modal

Berdasarkan Tabel diatas maka untuk Perbandingan Rasio Keserasian Kota Jakarta dan Surabaya selama 5 tahun adalah:

- 1) Tahun 2014 Kota Jakarta dan Kota Surabaya memiliki selisih Rasio Belanja Operasi 2,94% dimana Kota Surabaya memiliki jumlah yang lebih tinggi. Sementara Kota Jakarta memiliki tingkat Rasio Belanja Modal lebih tinggi 2,94% dari Kota Surabaya.
- 2) Tahun 2015 Kota Jakarta dan Kota Surabaya memiliki selisish Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal sebesar 3,49% dimana Kota Jakarta memiliki jumlah yang lebih tinggi Rasio Belanja Operasi dan Kota Surabaya memiliki



jumlah yang lebih tinggi pada Rasio Belanja Modal.

- 3) Tahun 2016 masih tetap memiliki selisih masing-masing rasio yang sama yaitu 5,91%. Kota Jakarta lebih tinggi pada Rasio Belanja Operasi dan Kota Surabaya lebih tinggi pada Rasio Belanja Modal.
- 4) Tahun 2017 tingkat Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal kedua pemda memiliki selisih yang berbeda, dimana Kota Jakarta memiliki tingkat Rasio Belanja Operasi lebih tinggi 10,01% dari Kota Jakarta, sementara tingkat Rasio Belanja Modal Kota Surabaya memiliki tingkat rasio lebih tinggi 10,05% dari Kota Jakarta, perbedaan angka selisish tersebut diakibatkan pemerintah daerah Kota Surabaya lebih meningkatkan alokasi anggaran ke Belanja Modal.
- 5) Tahun 2018 selisih Rasio Belanja Operasi sebesar 6,78% dengan Kota Jakarta yang memiliki rasio lebih besar, dan selisih Rasio Belanja Modal sebesar 6,60% dengan Kota Surabaya yang memiliki rasio lebih besar.
- 6) Selama 5 tahun jumlah perhitungan menunjukkan Kota Jakarta memiliki Rasio Belanja Modal lebih besar 5,14% dari Kota Surabaya, dan Kota Surabaya memiliki Rasio Belanja Modal lebih besar 5,10% dari Kota Jakarta ,

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kinerja pemerintah daerah Kota Jakarta selama periode 5 tahun menghasilkan peningkatan Kinerja dimana hasil persentase rasio menunjukkan angka yang cukup baik dari kriteria. Tingkat Rasio Kemandirian yang konsisten dan sekali mengalami peningkatan membuktikan bahwa pemerintah daerah Kota Jakarta mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan tingkat kemandirian yang tidak bergantung dengan dana dari pemerintah pusat. Kota Jakarta juga mampu memperbaiki tingkat Efektivitasnya dikarenakan Realisasi Pendapatan yang meningkat lebih besar dibanding anggaran yang diberikan. Efisiensi Kota Jakarta dalam mengatur pendapatan dan

belanja daerah juga dinilai cukup baik karena selalu berada pada kriteria yang efisien, meskipun mengalami naik-turun persentase namun akumulasi selama 5 tahun menunjukkan tingkat yang Efisien. Rasio Keserasian antara Belanja Operasi dan Belanja Modal menunjukkan jumlah pengeluaran yang lebih besar untuk Belanja Operasi

Dan pemerintah daerah Kota Jakarta juga mampu meningkatkan Rasio Pertumbuhan daerahnya dengan memperoleh realisasi pendapatan yang lebih besar tiap tahun dari tahun sebelumnya, meskipun sempat ada penurunan pertumbuhan yang diakibatkan oleh penurunan pendapatan asli daerah, akumulasi selama 5 tahun tetap menunjukkan peningkatan Rasio Pertumbuhan.

2. Kinerja pemerintah daerah Kota Surabaya selama periode 5 tahun menghasilkan peningkatan Kinerja yang sangat baik, dilihat dari persentase rasio yang dihasilkan. Kota Surabaya mampu mempertahankan tingkat Rasio Kemandiriannya sehingga tidak terlalu bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat dan menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Surabaya mampu meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan daerahnya. Tingkat Efektivitas Kota Surabaya juga menunjukkan persentase dan kriteria yang baik dengan selama 3 tahun berada di kriteria yang Sangat Efektif, artinya pemerintah daerah Kota Surabaya mampu merealisasikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan yang dianggarkan. Untuk Rasio Efisiensi pemerintah daerah dinilai boros dalam pengeluaran bahkan ada tahun dimana realisasi belanja daerah melebihi realisasi pendapatan yang diperoleh. Untuk pengeluaran dana yang dilakukan pemerintah daerah Kota Surabaya dalam Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal lebih besar dibelanjakan untuk operasi. Tingkat Rasio Pertumbuhan Kota Surabaya dari tahun 2014 hingga 2017 selalu mengalami tingkat pertumbuhan membuktikan bahwa jumlah pendapatan Kota Surabaya

besar tiap tahunnya, meski mengalami penurunan pada tahun 2018, akumulasi selama 5 tahun tetap menunjukkan angka persentase yang meningkat.

1. Pemerintah Daerah Kota Jakarta sebaiknya mengoptimalkan penerimaan dari potensi dan sumber-sumber pendapatan yang telah ada, memperkuat aturan dan pengawasan terhadap Pajak Daerah. Untuk memperkecil kekurangan serasian antara antara Belanja Operasi dan Belanja Modal sebaiknya pemerintah harus menciptakan standar ukuran atau patokan dalam mengambil kebijakan. Pemerintah daerah Kota Jakarta juga diharapkan meningkatkan alokasi anggaran ke Belanja Modal agar fasilitas dan kegiatan pembangunan daerah terus meningkat, juga dirasa harus meminimalkan pengeluaran belanja daerah yang dirasa kurang berpengaruh dalam pendapatan daerah.
2. Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebaiknya terus memaksimalkan perolehan PAD dengan mengoptimalkan kualitas dari sumber-sumber perolehan PAD. Mengingat juga terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber PAD maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang berpeluang untuk dikelola lalu dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan daerah. Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga perlu meningkatkan alokasi anggaran ke Belanja Modal agar fasilitas dan kegiatan pembangunan daerah terus meningkat, juga dirasa harus meminimalkan pengeluaran belanja daerah yang dirasa kurang berpengaruh dalam pendapatan daerah.
3. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain. Serta, dapat meneliti periode tahun selanjutnya
- [4] Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- [5] Mahmudi . (2010). Manajemen Keuangan Daerah. PT Erlangga: Jakarta
- [6] Mardiasmo. (2013). Perpajakan: Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
- [7] Mohamad Mahsun. (2011). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [10] Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Halim. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.
- [2] Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina. (2011). Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009. Skripsi . Institut Manajemen Telkom Bandung .
- [3] Badrudin. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN